

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Pemaparan penelitian terdahulu digunakan untuk menentukan posisi penelitian serta menjelaskan perbedaannya. Penelitian-penelitian terdahulu dan teori yang diperoleh dari literatur dijadikan sebagai acuan pada penelitian ini.

Untuk mengetahui perbedaan praktik manajemen laba berdasarkan siklus hidup perusahaan, Restuti dan Widyaningrum (2015) mengambil 224 sampel dari perusahaan dengan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitiannya tidak dapat membuktikan bahwa perilaku *earnings management* yang semakin rendah seiring perubahan siklus hidup perusahaan dikarenakan untuk mempertahankan investor tetap berinvestasi maka manajemen perusahaan melakukan manajemen laba besar-besaran pada tahap matang, sehingga perusahaan yang pada tahap ini melakukan manajemen laba yang paling tinggi. Sedangkan untuk perusahaan pada tahap pertumbuhan lebih rendah dalam melakukan *earnings management*.

Hastuti et al., (2017) melakukan penelitian hubungan antara siklus hidup perusahaan pada manajemen laba akrual dan menganalisis sistem pengendalian internal untuk memoderasi hubungan siklus hidup perusahaan dengan manajemen laba. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa siklus hidup tidak mempengaruhi manajemen laba akrual, tetapi sistem pengendalian internal dapat memperlemah pengaruh positif terhadap manajemen laba dari siklus hidup perusahaan. Struktur pengendalian internal dapat dijadikan perusahaan sebagai alat untuk mengendalikan peluang perilaku manajemen disemua kondisi perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hastuti (2011) memiliki tujuan untuk mengetahui apakah dalam perubahan siklus hidup perusahaan pilihan manajemen laba bisa berbeda dengan sampel 58 perusahaan dan menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitiannya menunjukkan hasil bahwa dalam penelitian tidak dapat membuktikan titik kritis perusahaan dalam melakukan manajemen laba riil.

Lisnawati dan Sebrina (2019) yang mana penelitiannya memiliki tujuan untuk menguji perilaku manajemen laba siklus hidup perusahaan dengan metode *purposive sampling* dan ada 61 perusahaan sebagai sampel penelitian. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan dalam tahap start-up, pertumbuhan, jatuh tempo dan penurunan cenderung melakukan manajemen laba nyata. Tidak adanya penurunan manajemen laba karena perubahan siklus hidup dari start-up, pertumbuhan, jatuh tempo serta penyusutan.

Mediaty (2013) melakukan penelitian untuk menguji apakah variabel asimetri informasi dengan kualitas laba akrual serta GCG memoderasi variabel kualitas laba akrual. Sampel penelitian ini memakai metode *purposive sampling* dengan jumlah perusahaan sebanyak 72. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa secara signifikan variabel asimetri informasi berpengaruh terhadap kualitas akrual dan variabel kepemilikan manajerial dan komposisi dewan komisaris independen dapat menjadi variabel moderasi antara asimetri informasi dan kualitas laba akrual.

Penelitian Mediaty (2013) dengan didukung penelitian Harahap (2017) membuktikan bahwa tindakan asimetri informasi dapat dipengaruhi dengan menunjukkan GCG memoderasi pengaruh yang dilakukan oleh manajer kepada

pemegang saham, sehingga untuk meningkatkan asimetri informasi pada pendapatan, meminimalkan tindakan manajemen laba yang ditujukan untuk manajemen.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan bahwa teori agensi muncul ketika suatu kontrak atau hubungan yang terjadi antara *principal* dengan *agent* didalam suatu perusahaan dalam pembuatan keputusan. Yang mana pemegang saham dinamakan sebagai *principal*, sedangkan pihak manajemen yang diberikan wewenang oleh pemegang saham sebagai pengelola perusahaan disebut dengan *agent*. Konsep manajemen laba menggunakan pendekatan teori agensi yang mana dapat dijelaskan dalam teori tersebut.

Menurut Sulistyanto (2008: 28–29) manajemen laba merupakan sisi lain dari teori agensi yang menekankan kepentingan penyerahan operasionalitas perusahaan dari pemegang saham (*principal*) kepada pihak lain yang memiliki kemampuan untuk mengelola perusahaan dengan lebih baik (*agents*). Teori agensi berfokus pada dua pihak yaitu *principal* dan *agent* yang memiliki tujuan serta kepentingan yang berbeda dimana beberapa individu bertindak untuk mendahulukan kepentingan pribadi sehingga mengabaikan kepentingan bersama (orang banyak) yang dapat menimbulkan perpecahan keagenan (*agency conflict*) yaitu adanya ketidakseimbangan kepentingan antara *principal* dan *agent*.

Jensen dan Meckling (1976) mengembangkan *Agency theory*, yang mana hubungan keagenan muncul jika ada kontrak antara satu orang atau lebih

(*principal*) yang menginstruksikan orang lain (*agent*) untuk melakukan jasa yang dimiliki oleh pemilik. Ada 2 faktor kontrak kerja yang efisien, antara lain :

1. Manajer (*Agent*) dan pemilik (*principal*) memiliki informasi yang seimbang, yaitu memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan informasi yang digunakan untuk kepentingan pribadi.
2. Risiko yang ditanggung *agent* berkaitan dengan imbal jasa adalah kecil, yakni *agent* memiliki kepastian yang cukup tinggi mengenai imbalan yang nantinya akan diterima.

Pada kenyataannya, konflik kepentingan antara *principal* dengan *agent* semakin meningkat karena pihak *principal* (pemegang saham) tidak dapat secara terus-menerus memantau aktivitas dari pihak *agent* (manajer perusahaan) dalam lingkungan perusahaan. Konflik tersebut disebabkan informasi yang dimiliki *principal* lebih sedikit dibandingkan dengan informasi yang didapatkan oleh *agent*, sehingga dapat menimbulkan konflik asimetri informasi seperti kurangnya informasi yang dimiliki oleh *principal* yang menyebabkan *principal* mudah percaya dengan *agent* demikian pula *agent* nantinya tidak akan menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada *principal*. Ketidakseimbangan informasi yang diperoleh antara dua pihak tersebut membuat pihak manajemen melakukan reaksi oportunistik dengan melakukan *earning management*.

Manajemen laba dihubungkan dengan teori agensi dengan menerapkan dalam berbagai siklus hidup perusahaan yang mana pelaksanaan dari mekanisme *good corporate governance* diharapkan dapat mengendalikan konflik keagenan dengan menerapkan sistem pengendalian serta pengawasan melalui *good*

corporate governance telah diterapkan secara maksimal. Berdasarkan dari teori agensi, pihak manajemen dikendalikan serta dipantau setiap aktivitasnya untuk memastikan pihak manajemen tidak melakukan aktivitas manajemen laba dengan membuat informasi laba menjadi tidak benar sehingga akan menyesatkan atau merugikan pihak lain.

2.2.2 Manajemen Laba

2.2.2.1 Definisi Manajemen Laba

Manajemen laba adalah aktivitas yang dilakukan oleh pihak *agent* untuk menaikkan atau menurunkan laba yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan untuk menyesatkan pemegang saham yang ingin mengetahui kondisi ekonomi suatu perusahaan. Menurut Sulistyanto (2008: 6) mendefinisikan manajemen laba sebagai upaya manajemen perusahaan dalam mencampuri atau mempengaruhi informasi-informasi yang terdapat dalam laporan keuangan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan keadaan perusahaan.

Tindakan tidak etis tersebut mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga dapat mengurangi keakuratan laporan keuangan yang dihasilkan akibat dari rekayasa laba yang dilakukan oleh pihak agen. Manajemen laba akan membuat laba yang didalam laporan keuangan tidak sesuai dengan realita yang ada, tetapi karena keinginan dari pihak manajemen perusahaan memperlihatkan sedemikian rupa sehingga kinerjanya terlihat baik (Lisnawati dan Sebrina, 2019).

2.2.2.2 Motivasi Manajemen Laba

Motivasi-motivasi yang dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam melakukan praktik manajemen laba. Berikut tiga faktor pendorong terjadinya manajemen laba, yakni (Sulistyanto, 2008: 63–64):

a. *Bonus plan hypothesis*

Bonus plan hypothesis menyatakan bahwa rencana bonus lebih cenderung menggunakan atau memilih metode akuntansi dengan meningkatkan laba yang dilaporkan menjadi lebih tinggi. Dalam konsep ini, pemilik menjanjikan kepada manajer akan memberikan sejumlah bonus jika kinerja perusahaan mencapai jumlah yang tertentu. Janji inilah yang memotivasi manajer perusahaan untuk mengelola dan mengatur laba perusahaan pada tingkat tertentu yang sesuai dan disyaratkan, demi memperoleh bonus yang telah dijanjikan tersebut maka manajer perusahaan bisa melakukan tindakan manajemen laba.

b. *Debt (equity) hypothesis*

Debt (equity) hypothesis menyatakan bahwa untuk meningkatkan pendapatan perusahaan yang memiliki rasio antara hutang dan modal yang besar, cenderung memilih dan menggunakan metode akuntansi. Dalam konteks tersebut manajer akan mengatur dan mengelola laba perusahaan agar kewajiban hutang-piutang yang seharusnya diselesaikan pada tahun tertentu dapat ditunda untuk periode berikutnya, sehingga semua pihak yang ingin mengetahui informasi tentang kondisi perusahaan yang sesungguhnya akan memperoleh informasi yang salah. Yang akibatnya, pihak-pihak yang membuat keputusan bisnis tersebut menjadi salah pula.

c. *Political cost hypothesis*

Political cost hypothesis menyatakan bahwa perusahaan lebih cenderung memilih dan menggunakan metode akuntansi yang dapat memperkecil atau memperbesar laba yang akan dilaporkan. Manajer perusahaan melakukan pelanggaran peraturan pemerintah, seperti undang-undang pajak. Dimana manajer perusahaan memperlmainkan laba agar pembayaran pajak menjadi tidak terlalu tinggi sehingga alokasi laba tersebut sesuai dengan kemauan perusahaan.

2.2.3 Siklus Hidup Perusahaan

Grafik yang menggambarkan perkembangan perusahaan yang dapat ditandai dengan adanya kemunculan tahapan-tahapan yang akan dilewati oleh setiap perusahaan disebut siklus hidup perusahaan. Siklus hidup perusahaan bisa digambarkan dengan siklus hidup produk, dimana jika perusahaan hanya berfokus pada satu siklus hidup produk saja maka perusahaan akan kehilangan gambaran mengenai apa yang terjadi dengan siklus hidup produk. Perusahaan memiliki siklus hidup yang sama halnya dengan produk dimana memiliki empat tahap, yaitu tahap *introduction* (pengenalan), tahap *growth* (pertumbuhan), tahap *mature* (pendewasaan) dan tahap *decline* (kemunduran) (Ginting, 2012: 104–105). Penelitian yang dilakukan oleh Hastuti dan Hutama (2010) siklus hidup perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap, yaitu *growth*, *mature* dan *stagnant*.

Pada saat *growth* adalah perusahaan dapat diibaratkan seperti remaja yang belum dewasa karena masih berusia relatif muda. Perusahaan akan mengalami pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi dari tahap – tahap yang lain. Dalam

tahap ini perusahaan memiliki jumlah investasi yang lebih besar sedangkan dividen yang dibayarkan masih rendah.

Pada tahap *mature* perusahaan dapat digambarkan sebagai orang dewasa. Perusahaan yang memasuki tahap *mature* akan mengalami tingkat penjualan menurun, pangsa pasar menurun serta pembayaran dividen lebih tinggi dari tahap sebelumnya (Hastuti et al., 2017). Menurut Hastuti (2011) perusahaan yang berada pada tahap *mature* mengalami penurunan laba. Perusahaan umumnya berada di tengah antara umur perusahaan yang berada pada tahap *growth* dan *stagnant*.

Perusahaan pada tahap *stagnant* memiliki kondisi yang stabil, namun pembayaran dividen yang tinggi, tingkat pertumbuhan penjualan dan jumlah investasinya rendah dibandingkan dengan perusahaan pada tahap *growth* maupun *mature*. Sehingga perusahaan tidak melakukan pengeluaran modal besar-besaran. Perolehan laba pada perusahaan tidak lagi banyak ditahan untuk melakukan pengembangan perusahaan (Hastuti, 2011). Untuk tahap ini perusahaan bisa dikatakan berada diposisi *stagnant* karena perusahaan tidak memasuki tahap *decline*, dimana perusahaan akan mengalami penurunan pada pembayaran dividen, penjualan serta pengeluaran modal.

Anthony dan Ramesh (1992) mengkategorisasikan pengukuran variabel siklus hidup perusahaan dengan menggunakan rasio pembayaran pertahun, presentase penjualan dan umur perusahaan sebagai indikator dari tahapan siklus hidup perusahaan. Sedangkan Dickinson (2011) menggunakan pola arus kas, yaitu arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan untuk mengkategorisasikan tahapan siklus hidup perusahaan.

2.2.4. Good Corporate Governance

2.2.4.1 Definisi Good Corporate Governance

Semakin banyaknya aktivitas dari tindakan manajemen laba ini telah mendorong berkembangnya perhatian publik terhadap konsep dari *Good Corporate Governance*. Istilah tersebut pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Commite*, yang menggunakan istilah dalam laporannya yang dapat dikenal dengan sebutan *Cadbury Report* pada tahun 1992 bertepatan di Inggris.

Definisi *Good Corporate Governance* menurut *Cadbury Comitte of United Kingdom* yaitu peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, pegawai serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban mereka. Dapat dikatakan suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan (Agoes dan Ardana, 2014: 101). GCG menurut Agoes (2014: 101) adalah sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan antara peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. GCG disebut juga sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian serta penilaian kinerjanya. Menurut *Center for European Policy Studies (CEPS)* dalam Sulisyanto (2008: 137) definisi *good corporate governance* yakni sebagai seluruh sistem hak, proses, dan pengendalian yang dibentuk didalam maupun diluar manajemen dengan tujuan untuk melindungi kepentingan *stakeholder*

Meskipun dari berbagai pendapat diatas terdapat sedikit perbedaan antara definisi yang satu dengan yang lain maka dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan suatu mekanisme pengawasan atau

pengendalian terhadap pihak manajemen perusahaan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan untuk menyelaraskan kepentingan antara dua pihak yaitu *agent* dan *principal*.

2.2.4.2 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

National Committe on Governance (NCG, 2006) pada tanggal 17 Oktober 2006 mempublikasikan “Kode Indonesia tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik”. NCG mengemukakan lima prinsip dari *Good Corporate Governance*, sebagai berikut (Agoes dan Ardana, 2014: 104–105) :

1. *Transparency* (Tranparansi) merupakan kewajiban bagi para pemegang saham untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi. Penyampaian informasi harus memiliki sifat keterbukaan, informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, tepat waktu dan tidak boleh dirahasiakan atau ditutup-tutupi pada semua pemangku kepentingan.
2. *Accountability* (Akuntabilitas) merupakan prinsip yang mana para pengelola wajib membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan serta tanggungjawab perusahaan setiap organisasi sehingga dalam pengelolaan dapat terlaksana dengan efektif. Prinsip akuntabilitas ini memberikan kejelasan hak dan kewajiban antara pemegang saham, dewan direksi dan dewan komisaris.
3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban) merupakan prinsip dimana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan yang

dilakukan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud dari kepercayaan yang telah diberikan.

4. *Independency* (Kemandirian) merupakan suatu keadaan dimana para pengelola perusahaan dalam mengambil keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan dan bebas dari pengaruh pihak manapun yang tidak sesuai dengan undang-undang serta prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (Kesetaraan) merupakan prinsip yang bertujuan supaya para pengelola memperlakukan semua para pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer (seperti : pemasok, pelanggan, karyawan, dan pemodal) maupun pemangku kepentingan sekunder (seperti : pemerintah, masyarakat dan yang lainnya).

Berdasarkan pada prinsip-prinsip dari *good corporate governance* yang memiliki tujuan menghambat tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Upaya untuk menghambat tindakan penyimpangan tersebut adalah dengan membangun *fairness* (kesetaraan), transparansi, akuntabilitas, *responsibility* serta kemandirian. Dengan terlaksananya penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada perusahaan secara konsisten, maka perusahaan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menurunkan tingkat manajemen laba sehingga terwujudlah perusahaan yang memiliki kehidupan bisnis yang sehat, bersih serta bertanggungjawab.

2.2.4.3 Mekanisme *Good Corporate Governance*

Mekanisme GCG memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi manajemen laba. Dimana mekanisme ini mempunyai kemampuan untuk

menghasilkan informasi yang berkualitas pada laporan keuangan serta dapat menghambat tindakan dari manajemen laba. Mekanisme *Good Corporate Governance* yang digunakan pada penelitian ini yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit.

2.2.4.4 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah bagian dari struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan sendiri memiliki peran penting, dimana dengan adanya struktur kepemilikan dapat menekan terjadinya konflik antara manajemen dengan pemegang saham. Kepemilikan manajerial merupakan proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut andil dalam proses pengambilan keputusan (Hery, 2017: 98).

Kepemilikan manajerial akan mengurangi masalah keagenan. Adanya kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen, maka pihak manajemen akan bertindak selaras dengan kepentingan antara pihak manajemen dan pemegang saham sehingga dapat menurunkan sifat oportunistik dari pihak manajemen. Dengan peningkatan kepemilikan manajerial maka keinginan untuk melakukan aktivitas manajemen laba akan berkurang karena pihak manajemen ikut merasakan langsung manfaat dan kerugian akibat dari keputusan yang diambil.

2.2.4.5 Kepemilikan Institusional

Untuk struktur kepemilikan selanjutnya adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh suatu institusi atau lembaga dari keseluruhan saham perusahaan yang beredar. Dengan adanya kepemilikan institusional ini dalam perusahaan,

maka pemegang saham perusahaan dapat monitoring kinerja yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan sehingga tindakan yang telah dilakukan dapat menghasilkan informasi yang sebenarnya tanpa di tutup-tutupi atau transparan. Menurut Siregar (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional dijalankan oleh investor aktif dan ikut andil dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan.

2.2.4.6 Dewan Komisaris Independen

Selanjutnya bagian dari *Good Corporate Governance* adalah Dewan Komisaris Independen. Yang mana, dewan komisaris memiliki peran sebagai monitoring dalam kebijakan direksi. Keberadaannya diharapkan dapat memonitor kegiatan yang dilakukan serta dapat meminimalisir permasalahan agensi yang ditimbulkan antara pihak manajemen dan pemegang saham sehingga kinerja perusahaan yang dihasilkan sesuai dengan tujuannya. Menurut Samsul (2006: 72) dan Fakruddin (2008: 103) menyatakan bahwa anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta yang tidak memiliki hubungan bisnis maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kinerjanya untuk bertindak independen dan semata-mata hanya untuk kepentingan perusahaan disebut dewan komisaris independen.

Sulistyanto (2008: 144) menyatakan bahwa ada beberapa misi yang harus dipikul oleh komisaris independen dalam mewujudkan kehidupan bisnis yang bersih, sehat serta bertanggungjawab. Misi yang pertama adalah mendorong terciptanya iklim yang objektif dan keadilan untuk semua kepentingan sebagai prinsip utama pembuatan keputusan manajerial. Yang kedua, bertanggungjawab

dalam mendorong diterapkannya prinsip dan praktek *good corporate governance* dengan melalui pemberdayaan dewan komisaris independen agar dapat melakukan tugasnya sebagai pengawasan dan pemberi nasihat kepada manajer secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Sehingga dewan komisaris ini dapat dijadikan sebagai alat pengendali serta pengawasan di dalam perusahaan dan diharapkan dengan adanya dewan komisaris ini bisa memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan untuk menghambat aktivitas-aktivitas manajerial.

2.2.4.7 Komite Audit

Komite audit merupakan suatu kelompok yang dibentuk oleh dewan komisaris dan memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan serta pengawasan terkait strategi dan pengelolaan perusahaan. Komite audit memiliki peran yang sangat penting bagi pengelolaan perusahaan, karena komite audit sebagai sistem pengendalian dalam suatu perusahaan yang menghubungkan antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen perusahaan. Menurut Samsul (2006: 72) komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris pada perusahaan tercatat untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat.

Komite audit memiliki tugas yakni melakukan pengawasan untuk meningkatkan efektivitas dalam menciptakan keterbukaan dan pelaporan keuangan yang berkualitas, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengawasan internal yang memadai (Sulistyanto, 2008: 141).

Kemungkinan munculnya komite audit sendiri disebabkan oleh adanya suatu kecenderungan yang mengakibatkan semakin meningkatnya berbagai skandal atau dari aktivitas-aktivitas rekayasa manajerial yang berupa penyelewengan serta kelalaian yang dapat menandakan kurang memadainya sistem dari pengawasan.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Siklus Hidup Perusahaan Terhadap Manajemen Laba

Teori agensi menjelaskan timbulnya praktik manajemen laba pada perusahaan. Teori agensi mengasumsikan bahwa ada pemisahan pihak *principal* dengan pihak *agent* yang dapat menimbulkan konflik keagenan (*agency conflict*) yang terkait dengan laba perusahaan dalam laporan keuangan (Jensen & Meckling, 1976). Munculnya konflik keagenan ini disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan yang saling bertentangan antara pihak *principal* dengan pihak *agent* yang mana kedua belah pihak tersebut memiliki kepentingan masing-masing, dikarenakan *principal* dan *agent* memiliki tujuan untuk memaksimalkan kepentingan masing-masing dan meninggalkan kepentingan bersama.

Siklus hidup perusahaan adalah suatu grafik yang menggambarkan perkembangan suatu perusahaan yang ditandai dengan munculnya tahapan-tahapan yang akan dilewati oleh setiap perusahaan. Yang mana perusahaan-perusahaan tersebut pasti akan mengalami siklus hidup. Suatu perusahaan akan mengalami tiga tahap siklus hidup perusahaan diantaranya yaitu *growth*, *mature* dan *stagnant* (Hastuti dan Utama, 2010). Dimana perusahaan pada tahapan siklus hidupnya akan memiliki kemungkinan adanya praktik manajemen laba. Berdasarkan teori agensi yang telah diuraikan diatas, pihak manajemen (*agent*)

yang ditunjuk pemegang saham sebagai pengelola perusahaan harus menghadapi siklus hidup perusahaan dengan hasil berupa kinerja yang baik.

Pengaruh siklus hidup perusahaan terhadap manajemen laba dari penelitian sebelumnya telah memperoleh hasil yang beragam. Restuti dan Widyaningrum (2015) menunjukkan bahwa tindakan manajemen laba lebih besar dilakukan perusahaan pada tahap *mature* dibandingkan perusahaan pada tahap *growth*, karena pada tahap *growth* perusahaan berada pada tingkat penjualan yang tinggi dan mulai melakukan diversifikasi produk. Hastuti (2011) mengemukakan bahwa perusahaan yang berada pada titik kritis *growth-mature* dan *mature-stagnant* melakukan praktik manajemen laba dengan menaikkan laba. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dihipotesiskan sebagai berikut :

H₁ : Siklus hidup perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba

2.3.2. Good Corporate Governance Memoderasi Hubungan Siklus Hidup Perusahaan Dengan Manajemen Laba

Penerapan GCG sangat penting dalam perusahaan sebagai pengendalian dan pengawasan dalam dunia bisnis, karena dapat menekan tindakan dari pihak manajemen perusahaan dalam melakukan praktik manajemen laba. *Good Corporate Governance* merupakan suatu mekanisme pengendalian atau pengawasan terhadap pihak manajemen perusahaan berdasar pada peraturan perundang-undangan dengan untuk menyelaraskan kepentingan antara dua belah pihak yakni *agent* dan *principal*. Mekanisme *Good Corporate Governance* memiliki empat faktor yakni kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit.

Dengan adanya mekanisme tersebut maka perusahaan diharapkan dapat membatasi serta mencegah adanya penyimpangan praktik manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Berdasarkan teori agensi, pihak *principal* (pemegang saham) harus melakukan monitoring serta mengendalikan pihak *agent* (manajemen perusahaan) untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan pihak manajemen sudah sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang telah diputuskan yang mana dilaporkan secara transparan, akuntabilitas, responsibilitas, keadilan serta independency. Hal ini disebabkan oleh upaya penerapan prinsip *good corporate governance* dalam sebuah perusahaan akan dapat menurunkan kemungkinan peluang dilakukannya praktik manajemen laba oleh pihak manajemen perusahaan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Dari hasil penelitiannya (Cahyadi dan Mertha, 2019) bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan pada manajemen laba. Jika manajemen perusahaan memiliki saham perusahaannya maka manajemen akan mengoptimalkan kinerja mereka dan memperhatikan kesejahteraan para investor dengan adanya kepemilikan manajerial maka tindakan manajemen laba akan berkurang. Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan hipotesis penelitian ini adalah :

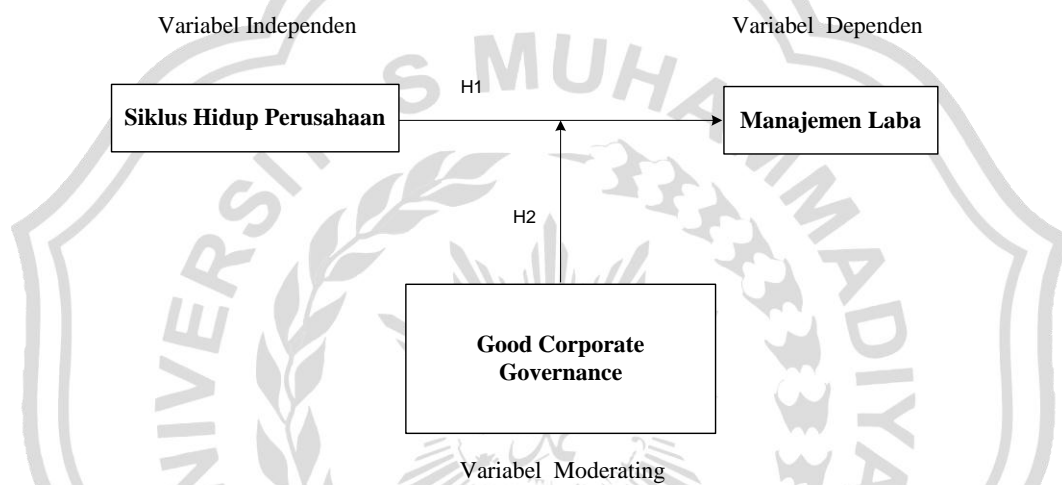
H₂ : *Good Corporate Governance* memoderasi hubungan siklus hidup perusahaan dengan manajemen laba.

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu model yang menjelaskan bagaimana hubungan teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi dalam sebuah

masalah tertentu. Dengan dibuatnya kerangka berpikir dari “Hubungan Siklus Hidup Perusahaan dan Manajemen Laba : *Good Corporate Governance* sebagai Variabel Moderating” pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2018 dapat memberikan gambaran yang sistematis dan jelas.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan kerangka berfikir sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Sumber : Data diolah, 2020

Dari kerangka pikir tersebut dapat diketahui bahwa variabel dependen (Y) yakni manajemen laba dipengaruhi oleh variabel independen (X) yakni siklus hidup perusahaan dan *Good Corporate Governance* (Z) sebagai variabel moderasi yakni kepemilikan manajerial (Z_1), kepemilikan institusional (Z_2), dewan komisaris independen (Z_3) serta komite audit (Z_4).